

### Zulkifli Hi Mannu

Aktivis LSM Kabupaten Tojo Una-Una,  
Sulawesi Tengah  
Email: mrsky\_kifli@yahoo.co.id

### Inu Kencana Syafii

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-  
versitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: inukencanasyaфии@yahoo.co.id

[http://dx.doi.org/10.18196/  
jgpp.2014.0009](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0009)

# Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial

225

## ABSTRACT

The purpose of this study was 1) to determine the government's strategy in dealing with the Poso area of social conflict and 2) to assess the constraints faced by local governments in dealing with conflict in Poso sosial. Jenis in this research is a qualitative descriptive study using a case study approach took place in Poso, Central Sulawesi. Descriptive study (descriptive research) is a research method that is intended to describe the phenomena that exist, which takes place in the present or the past. Methods of data collection in this research is to use interviews and documentation. The informant in this research is the Local Government Poso, Poso Regional Police and Community Leaders Poso. Results from the study is that there are three strategies Poso district governments in the face of social conflicts. The first economic development policy by opening jobs, economic empowerment, providing educational facilities and health facilities. Both of multicultural education by building schools harmony in collaboration with religious leaders and religious organizations. The third inter-religious dialogue by establishing the Forum for Religious Harmony which is funded budget. While the constraints faced by the local authorities in the face of social conflict in Poso: First there is no permanent reconciliation. Both recovery funds for humanitarian tragedy of the central government has not been well targeted and Third stigma that religion causes conflict. The results of this study can be used as a reference for other regions in anticipation of a conflict that could lead to social conflict. The conflict in the region is generally caused by economic factors, but wrapped in religious conflicts.

Keyword : Local Government, Policy Strategy, Social Conflict

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial dan 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengambil lokasi di Poso, Sulawesi Tengah. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Poso, Kepolisian Daerah Poso dan Tokoh Masyarakat Poso. Hasil dari penelitian adalah ada tiga strategi pemerintah kabupaten Poso dalam menghadapi konflik sosial. Pertama kebijakan pembangunan ekonomi dengan cara membuka lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, memberikan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Kedua pendidikan multikultural dengan membangun sekolah harmoni yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan. Ketiga dialog antar umat beragama dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang didanai APBD. Sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah Daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial yaitu: Pertama belum ada rekonsiliasi permanen. Kedua dana recovery untuk tragedi kemanusiaan dari pemerintah pusat belum tepat sasaran dan Ketiga stigma bahwa

agama penyebab timbulnya konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam mengantisipasi terjadinya konflik yang dapat menyebabkan konflik sosial. Konflik yang terjadi di daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, akan tetapi dibungkus dengan konflik agama.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi Kebijakan dan Konflik Sosial.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, tiga ratus lebih suku, budaya, agama, serta aliran kepercayaan menempatkan Indonesia sebagai negara besar di dunia dengan tingkat multikultural yang tinggi. Jika potensi ini dapat dikelola secara baik akan memberikan kesejahteraan kepada bangsa ini, tetapi sebaliknya jika tidak baik dalam mengelolanya dan diperburuk lagi dengan efek negatif yang terdapat pada era modern seperti sekarang ini maka hal tersebut akan menghasilkan konflik sosial (Tan, 2006:36).

Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, dan masalah kekuasaan, tetapi emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik (Noer dan Syam, 2008:424).

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), di Indonesia misalnya gerakan separatisme yang terjadi di beberapa provinsi diantaranya: Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Selanjutnya konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama seperti konflik etnis dan agama yang terjadi di beberapa daerah seperti di Maluku, Sambas, dan Poso (Witarti dkk 2012:2).

Konflik di Poso bermula dari terjadinya penusukan kepada seorang remaja muslim yang dilakukan oleh seorang remaja kristen. Kejadian tersebut diakui oleh banyak pihak sebagai permasalahan yang ditimbulkan oleh minuman keras, akan tetapi permasalahan

tersebut menjadi konflik yang serius yang menyebar diseluruh Kabupaten Poso (Klinken, 2007: 120). Konflik yang semula terjadi antar pemuda berubah menjadi konflik antar Agama dan berlangsung beberapa kali hingga menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa.

Puncak dari konflik sosial di Kabupaten Poso pada pada tanggal 16 April 2000 ketika Muin Pusadan terpilih menjadi Bupati Poso. Konflik terjadi karena pihak penganut Kristen tidak dapat menerima kemenangan tokoh ini. Pada tanggal 16 April 2000 konflik kembali pecah, aksi saling serang dan bakar terjadi lagi. Pada tanggal 27 April 2000, kelompok muslim melakukan penyerangan dan pembakaran di Kelurahan Lombogia. Serangan balasan dari pihak kelompok Kristen terjadi pada 20 Mei 2000 ke Pesantren Wali Songo di desa Sintuwulemba. Sekitar 100 warga muslim tewas pada kejadian itu (Hendrajaya, 2010:23)

Menurut Pamuji dkk (2008:31) persoalan kesenjangan ekonomi adalah masalah yang tidak dapat dilepaskan dalam konflik Poso. Persoalan ekonomi ini ditandai dengan beralihnya kepemilikan tanah masyarakat pribumi ke masyarakat migran, transmigrasi merupakan akar masalah konflik sosial di Kabupaten Poso (Muin, 2008: 3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya konflik di Poso dipengaruhi faktor ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya peralihan kepemilikan tanah masyarakat pribumi ke masyarakat pendatang. Akar masalah konflik sosial ini sesuai dengan teori penyebab konflik yang disampaikan oleh Fisheryang menyatakan bahwa konflik sosail dapat disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomiFisher dkk (2001:8).

Berkat komitmen pemerintah akhirnya konflik Poso dapat diselesaikan sehingga Poso sekarang sudah amand an tentram di Poso pasca perjanjian Malino.Upaya Polri untuk membangun

suasana aman dan tentram di Poso pasca perjanjian Malino merupakan bagian dari implementasi Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, sehingga upaya mewujudkan keamanan dalam negeri merupakan bagian dari komitmen Polri sebagai penyelenggara fungsi Keamanan Dalam Negeri pasca pemisahan Polri dari TNI (Muradi, 2012:81)

Guna mencegah konflik sosial di Poso tidak terjadi kembali lagi, maka diperlukan strategi yang tepat dalam mencegahnya. Namun, bagaimana strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial di Poso tersebut? Dan apa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial di Poso? Berkaitan dengan hal tersebut, kontribusi berbagai pihak juga dibutuhkan, terutama kontribusi dari pihak pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab di daerah.

## **KERANGKA TEORI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang yang mengatur: “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004”.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Suhady dalam Tjandra (2009: 197) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyara-

kat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra, 2009: 197).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

### KONFLIK SOSIAL

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk (2002: 175) konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dalam hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (Bunyamin Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Sedangkan menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Wirawan (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh satu individu dengan individu lain atau antara suatu kelompok dengan kelompok tertentu. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan antara individu-individu (ciri-ciri badaniah), perbedaan unsur-unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang terlalu cepat, perbedaan pola-pola perilaku,

dan perbedaan kepentingan.

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama. Lebih lanjut, untuk membahas setiap situasi konflik, Coser membedakan konflik menjadi dua tipologi, yakni konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik (konflik yang digunakan untuk mendapatkan atau memenuhi kepentingan tertentu), konflik non realistik yaitu konflik hanya sebagai media melepas ketegangan atau mencari kambing hitam (M. Poloma, 2007:106)

Menurut Rothchild dan Sriram (dalam Wirawan, 2009: 38-39) konflik antar kelompok ke dalam empat fase diantaranya:

1. Fase potensi konflik (*potential konflik phase*) pada fase ini konflik telah terjadi namun dalam intensitas yang rendah. Fase ini dapat disebabkan oleh sosio-ekonomi, kultur dan politik.
2. Fase pertumbuhan (*gestation phase*), dalam fase ini isu yang ada dipertentangkan, hubungan antar kelompok lebih dipolitisir dan dimobilisasi sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadinya kekerasan makin tinggi.
3. Fase pemicu dan eskalasi (*triggering and escalastion phase*), dalam fase ini ditandai dengan adanya kekerasan massal yang terorganisir, terputusnya jaringan komunikasi antarelit, kelompok yang bertikai mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain dan merasa tidak dapat berkompromi.
4. Fase pascakonflik (*post-conflict phase*), fase ini terbagi atas dua bagian yang terpisah, yakni; fase keamanan jangka pendek yang melibatkan dukungan dari militer, serta fase keamanan jangka panjang yaitu rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi membantu membangun kembali hubungan antar kelompok sebagai upaya perdamaian yang berkelanjutan.

Fisher dkk (2001:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam

232 masyarakat.

1. Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat.
2. Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
3. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini menyatakan bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.
4. Teori Identitas. Teori ini menyatakan bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.
5. Teori Transformasi Konflik. Teori ini menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

## STRATEGI DAN MANAJEMEN KONFLIK

### A. STRATEGI

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* yang artinya militer, dan *geia* yang artinya memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai perang, dalam hal ini jenderal dibutuhkan untuk memimpin satu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 2002: 3). Sedangkan Marrus (2002:31)

memberikan pengertian strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Asmoko (2011:5) strategi pada organisasi sektor publik terdiri dari komponen yang sama dengan sektor privat. Pada organisasi sektor publik menekankan pada pentingnya proses perumusan strategi yang terdiri dari delapan langkah interaktif yaitu perjanjian awal diantara pembuatan keputusan, identifikasi mandat yang dihadapi organisasi pemerintah, klarifikasi misi dan nilai organisasi, identifikasi peluang eksternal dan ancaman yang dihadapi organisasi, identifikasi kekuatan internal dan kelemahan organisasi, identifikasi isu strategi, pengembangan strategi, dan gambaran organisasi di masa mendatang.

## B. MANAJEMEN KONFLIK

Manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai segala seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apakah tujuan tersebut berupa akomodasi, dominasi atau kemenangan suatu pihak. Manajemen konflik atau pertentangan juga diartikan sebagai kemampuan dalam mengendalikan ambiguitas dan paradoks yang terjadi dalam suatu konflik (Miyarso, 2007:6)

Priiliantini (2008:13) mendefinisikan manajemen konflik sebagai cara-cara yang berbeda, dalam hal ini konflik dapat dikelola oleh para pihak sendiri. Hal ini berarti, para pihak yang terlibat konflik dapat menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa melibatkan pihak luar. Sedangkan menurut Irvine dalam Wirawan (2009:131) manajemen konflik adalah strategi organisasi dan individu yang bekerja untuk mengenali dan mengendalikan perbedaan-perbedaan, dengan cara pengurangan biaya keuangan dan manusia dari kesulitan pengendalian konflik, sementara keselarasan konflik sebagai sumber

**234** pembaharuan dan perkembangan.

Menurut Gottman dan Korkoff sebagaimana dikutip oleh Maharani (2008:4) bahwa secara garis besar manajemen konflik terbagi menjadi:

1. Manajemen konflik destruktif yang meliputi *conflict engagement* (menyerang dan lepas control), *withdrawal* (menarik diri) dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri, dan *compliance* (menyerah dan tidak membela diri).
2. Manajemen konflik konstruktif yaitu *positive problem solving* yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutan mereka agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan sebaliknya sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang.

Salah satu strategi manajemen konflik menurut Gito sudarmo dan Sudita (2000: 123) dapat dilakukan dengan manajemen konflik konstruktif yaitu *positive problem solving* yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Melalui strategi ini memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil akhir. Strategi penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik.

Inti dari strategi ini adalah setiap kelompok yang berkonflik mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan

hasil akhir. Kedua kelompok yang terlibat konflik dapat melakukan kompromi dan negosiasi agar keinginan dan kepentingannya bisa terakomodasi. Dalam strategi ini dibutuhkan pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar masing-masing pihak dapat menerima hasil yang disepakati.

Ada beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Fisher dkk, (2001:6-7) menggambarkan sebagai berikut:

1. Pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi konflik yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari konflik menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Berdasarkan pendekatan penanganan konflik sosial menurut Fisher dkk (2001:6-7) di atas maka dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pendekatan yang kelima yaitu transformasi konflik. Adapun transformasi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Gumilang (2014:1) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, disebutkan bahwa konflik sosial dapat terjadi salah satunya dilatarbelakangi oleh permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk menghadapi terjadinya konflik sosial maka diperlukan strategi yang berkaitan dengan ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan modal kerja dan lain sebagainya.

2. Dialog antar Umat Beragama

Mengatasi konflik antar agama, atau tepatnya antar umat beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kata dialog ini tidak berarti harus formal, diselenggarakan dalam ruangan, tetapi yang lebih fundamental adalah dialog melalui pergaulan sehari-hari, dialog melalui media televisi, surat kabar dan buku-buku. Dialog yang dilakukan antar umat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu pandangan teologi yang bersifat inklusif (Hidayat, 1995: 80).

3. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan mindset (pemikiran) pelajar/mahasiswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman (Nasrudin, 2012: 9-10).

## METODE PENELITIAN

237

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengambil lokasi di Poso, Sulawesi Tengah. Menurut Sukmadinata (2011: 72) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Arikunto (2002: 140) bahwa menjelaskan penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang di lakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Sedangkan, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, oleh karenanya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sutopo (2006:74) menyatakan wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap antara peneliti dengan sumber informasi. Pada penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Kepolisian Daerah Poso, tokoh masyarakat. Menurut Sugiyono (2011: 240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat

**238** berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

## **PEMBAHASAN**

### **STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN POSO DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL**

Terdapat beberapa strategi pemerintah kabupaten Poso dalam menghadapi konflik sosial yang ditemukan penulis melalui wawancara dengan narasumber penelitian, diantaranya:

#### **A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

Akar dari konflik sosial yang terjadi di Poso, menurut Jusuf Kalla terjadi bukan karena masalah agama namun adanya rasa ketidakadilan (Nanny, 2013: 11). Ketidakadilan tersebut disebabkan adanya kesenjangan ekonomi karena tingginya tingkat pengangguran. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Sapruni bahwa “sebenarnya permasalahan yang terjadi di Poso karena adanya kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Pemerintah Daerah harus membuka lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, memberikan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, unsur-unsur ini diharapkan dapat bersinergi dan dapat dinikmati oleh masyarakat (Wawancara dengan Bapak Sapruni, Akademisi/Wakil Rektor UNSIMAR pada 23 Juli 2014)”.

Konflik sosial yang terjadi di Poso juga telah disadari oleh Pemerintah Daerah Poso bahwa penyebabnya bukan masalah agama akan tetapi ada beberapa faktor yang terkait dengan masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Poso dalam mencegah terjadi kembali konflik sosial di Poso maka Pemerintah Daerah Poso telah membuat kebijakan untuk memenuhi peningkatan perekonomian masyarakat agar tidak adanya lagi pengangguran dan kesenjangan ekonomi di antara masyarakat. Seperti pernyataan Bapak T. Syamsury “Pemerintah Daerah menyadari perpecahan di Poso disebabkan berbagai faktor yaitu kemiskinan, lapangan kerja,

upaya pemerintah dalam kebijakannya yaitu membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk dapat memenuhi peningkatan perekonomian masyarakat agar tidak adanya lagi pengangguran dan kesenjangan ekonomi di antara masyarakat.(Wawancara dengan T. Syamsury, Wakil Bupati Poso 2010-2015 pada 5 Agustus 2014)”.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus kepada Pemerintah Daerah Poso untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca konflik. Bantuan pemerintah pusat berupa anggaran khusus ini cukup signifikan dan cukup baik serta dapat membantu Pemerintah Daerah Poso dalam membangun kembali Kabupaten Poso. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Purnama Megati bahwa “Bantuan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah Poso khususnya pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca konflik cukup signifikan dan cukup baik serta dapat membantu Pemerintah Daerah dalam membangun kembali Poso. Sasaran dana terhadap masyarakat yang sulit dan susah pada saat konflik itu terjadi seperti pembangunan kembali rumah yang terbakar, memberi bantuan perekonomian seperti koperasi, UKM dan bantuan ini sangat membantu masyarakat Poso. Prioritas kebijakan pemerintah Poso saat ini yaitu pengembangan pertanian, UKM dan koperasi serta pariwisata. Dalam bidang pertanian, pendapatan masyarakat sudah meningkat. Dalam bidang UKM dan koperasi telah berkembang setiap tahunnya. Bidang pariwisata, dapat menarik investasi pariwisata di daerah Poso. (Wawancara dengan Purnama Megati, Kepala Bappeda Poso pada 23 Juli 2014).

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Poso, Pemerintah Daerah Poso telah menciptakan lapangan kerja agar mengurangi tingkat pengangguran. Salah satunya adalah Pembangunan pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) Sintuwu Maroso dikompleks Terminal Siwagilemba Kecamatan Poso. Keseriusan Pemerintah Daerah Poso dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat juga dilakukan

melalui sektor pariwisata. Keseriusan Pemerintah Daerah Poso dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 - 2032 yang di dalamnya mengatur tentang mengembangkan kawasan taman nasional dengan memanfaatkan sebagai kawasan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan (Pasal 5, Perda Nomor 8 Tahun 2012).

Pada perda Nomor 8 Tahun 2012 secara spesifik Pemerintah Daerah Poso telah menetapkan kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata seperti Danau Poso, Pantai Tando Duwangko, Tando Bone, Watu Nggongi, Watu Mpagasa Angga, Watu Baula, Watu Yano, Air Terjun Saluopa dan Air Terjun Tumonda di Kecamatan Pamona Puselemba dan lain sebagainya. Sektor koperasi di Kabupaten Poso juga telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan koperasi di Kabupaten Poso dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Baik dari segi jumlah koperasinya, anggota serta jumlah permodalan dan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh. Berdasarkan data yang ada, jumlah koperasi di Kabupaten Poso pada tahun 2009 mencapai 194 unit dengan jumlah anggota mencapai 24.994 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 224 unit dengan jumlah anggotanya mencapai 26.610 orang.

Dari jumlah tersebut, jumlah koperasi yang tergolong aktif dan sehat atau dengan kata lain rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu sebanyak 169 unit pada tahun 2009 dan 199 unit dalam tahun 2010 lalu. Bahkan kata dia, dalam tahun 2011 ini pihak Pemerintah Daerah Poso menargetkan pertumbuhan koperasi di Kabupaten Poso bisa mencapai 236 unit. Perkembangan koperasi di Kabupaten Poso ini tidak terlepas dari perhatian Pemerintah Daerah Poso dalam menyediakan suntikan modal bagi koperasi yang dinilai layak dan sehat (Mangun, 2011:1).

Pemerintah Daerah Poso juga telah melakukan perbaikan dalam

sektor pertanian. Perbaikan ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Keseriusan Pemerintah Daerah Poso dalam melindungi lahan pertanian ini tercermin pada Ketentuan Pidana Bab XIV perda tersebut. Ketentuan pidana pada Peraturan Daerah tersebut menyebutkan Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Terbitnya perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini mengatur adanya perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Poso kepada para petani. Pada pasal 35 menyebutkan bahwa perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa pemberian jaminan harga komoditi yang menguntungkan, memperoleh sarana dan prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian pokok, pengutamakan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional dan kompensasi akibat gagal panen (Pasal 35 perda Nomor 2 Tahun 2013).

Akan tetapi menurut tokoh masyarakat Poso, Pemerintah Daerah hingga saat ini terlalu fokus pada pembangunan fisik tetapi masih belum menyentuh pembangunan non fisik. Alokasi anggaran untuk pembangunan fisik masih lebih besar daripada alokasi anggaran untuk non fisik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebenarnya mengalami rasa sakit pada non fisik karena rasa trauma, kehilangan, dendam dan lain sebagainya. Ini dibuktikan saat ini di Poso masih ada kekhawatiran dengan rasa aman terhadap masyarakat karena secara substansi kebijakan Pemerintah Daerah belum dapat mencegah ancaman terhadap masyarakat Poso. Tolak ukurnya masih adanya teror, masih munculnya persepsi gap-gap antar kelompok belum adanya rasa persatuan, yang dilihat saat ini hanya terjadi pada permukaan.

#### B. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Pendidikan multikultural akan mencakup: (1) Ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, (2) Gerakan pembaharuan pendidikan, (3) Proses pendidikan (Sutarno, 2008:20). Secara luas multikultural mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, jenis kelamin, agama, status sosial ekonomi, identitas budaya, ras, bahasa, dan kebutuhan khusus. Sehingga perilaku peserta didik akan beraneka ragam dan cenderung heterogen (Widodo, 2012: 219).

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa, mereka setuju bahwa dengan penerapan pendidikan multikultural dapat meningkatkan rasa sensitifitas terhadap sesama. Sebagaimana pernyataan Bapak Sapruni “pendidikan multikultural tepat diterapkan di poso agar dapat menghilangkan dendam dan sensitifitas terhadap sesama. Sebenarnya program pendidikan multikultural bukan dari program Pemerintah Daerah tetapi program ini dari LSM-LSM nasional dan internasional, hanya saja program tersebut dikerjasamakan dengan pihak Pemerintah Daerah”.

(Wawancara dengan Sapruni, Akademisi/Wakil Rektor UNSIMAR 23 Juli 2014).

243

Salah satu tokoh masyarakat Bapak Frans Saolino menambahkan bahwa pendidikan yang berbasis multikultural dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan di Poso. Diterangkan lebih lanjut bahwa “salah satu solusi tragedi kemanusiaan di Poso adalah pendidikan yang berbasis multikultural, multietnis dalam satu kawasan yang terintegrasi dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, ada juga pendekatan usaha bersama secara multikultural dan multietnis dengan mengembangkan ekonomi masyarakat Poso melalui lembaga ekonomi masyarakat yang mewadahnya seperti koperasi, lembaga petani, nelayan dsb yang terintegrasi satu sama lainnya. Agar yang dibangun dalam lembaga tersebut saling memiliki untuk kemajuan ekonomi bersama bukan atas dasar persaingan dan kesenjangan ekonomi yang ada”. (Wawancara dengan Frans Saolino, tokoh masyarakat pada 22 Juli 2014).

Salah satu bentuk pendidikan yang berbasis multikultural di Poso adalah dengan membangun sekolah harmoni yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Poso, tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan. Salah satu sekolah yang telah menerapkan sekolah harmoni adalah SDN 7 Poso. Bapak Purnama Megati menyatakan bahwa “saat ini, di Poso telah dibangun sekolah harmoni yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Poso, tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan dsb. Jadi contoh sekolah harmoni yang ada di Poso yaitu SDN 7 Poso dan siswanya mulai ditanamkan ajaran tentang harmoni diri (disiplin), harmoni lingkungan (menjaga lingkungan) dan harmoni sesama (menjaga kebersamaan dan persatuan)”. (Wawancara dengan Purnama Megati, Kepala Bappeda Poso pada 23 Juli 2014).

Pendidikan harmoni merupakan pengembangan sistem pendidikan yang berbasis kebersamaan, persatuan, saling menghormati,

menghargai antar sesama karena awalnya Daerah Poso masih bernuansa SARA. Dengan adanya pendidikan harmoni ini maka diharapkan tidak ada lagi perselisihan antar masyarakat karena faktor agama.

Dalam menangani konflik sosial di Kabupaten Poso dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik (kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Fisher dkk, 2001:6-7). Salah satu sebab timbulnya konflik sosial di Kabupaten Poso adalah adanya persaingan antar kelompok Kristen dan Islam untuk menempati posisi Bupati. Kelompok Kristen tidak rela jika yang menjadi Bupati adalah orang Islam karena penduduk mayoritas di Kabupaten Poso adalah orang Kristen. Konflik di Poso juga disebabkan oleh kurangnya rasa kepercayaan antara sesama penduduk, kecemburuan sosial, provokasi yang menyentuh pada sentimen antar agama.

Kurangnya rasa kepercayaan antara sesama penduduk, kecemburuan sosial dan sentiment agama ini dapat dicegah dengan pendidikan multikultural. Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (set of beliefs), dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Dalam hal ini, adanya pengakuan yang menilai pentingnya aspek keragaman budaya dalam membentuk perilaku manusia. Pendidikan Multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik baik pria maupun wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik di sekolah.

Pendidikan Multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua peserta didik tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian adanya namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan (Widodo, 2012: 220). Dengan adanya kesadaran bahwa setiap manusia memiliki perbedaan satusama lainnya maka tidak ada konflik sosial yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga akan menimbulkan konflik sosial.

### C. DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA

Dialog antar umat beragama dilakukan sebagai sarana untuk menjaga kerukunan dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Dalam melakukan dialog dengan agama lain, apapun bentuknya, diperlukan adanya sikap saling terbuka, saling menghormati dan kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Sikap-sikap ini diperlukan untuk mencari titik temu (kalimatun sawa) antar agama, karena masing-masing agama mempunyai karakteristik yang unik dan kompleks.

Pentingnya dialog antar umat agama inilah dijadikan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi konflik sosial atau disintergrasi Sosial. Bentuk dari dialog antar umat beragama adalah dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB yang dibentuk oleh pemerintah poso, menurut AKBP Susnadi sudah cukup membantu terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Prosesnya berjalan dengan baik dan hasilnya sangat membantu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di poso dan dapat mencegah terjadinya perpecahan lagi antara kedua klompok-kelompok agama di poso. (Wawancara dengan AKBP Susnadi Kapolres Poso 5 Agustus 2014).

Bukan hanya membentuk, Kepolisian Kabupaten Poso juga

melakukan pembinaan terhadap terhadap mantan napi teroris. Pembinaan terhadap mereka dilakukan untuk membatasi ruang gerak oknum yang memiliki paham radikal ini tidak meluas kemasyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini Kepolisian Kabupaten Poso kerjasama dengan MUI, KEMENAG, pihak sekolah dan majelis ta'lim yang ada diPoso. Berdasarkan keterangan AKBP Susnadi diketahui bahwa "Kepolisian melakukan pembinaan terhadap tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB. Tantangan diposo saat ini yaitu dengan adanya kelompok radikal yang bersikeras agar terjadinya kembali konflik di poso, pihak kepolisian juga melakukan pembinaan terhadap mereka dengan cara membatasi ruang gerak mereka agar paham radikal ini tidak meluas kemasyarakat, kepolisiann kerjasama dengan MUI, KEMENAG, pihak sekolah-sekolah dan majelis ta'lim yang ada di poso ini. Selain itu, kepolisian melakukan pembinaan terhadap mantan napi teroris, mantan jihadis dan simpatisan kelompok radikal yang membatasi tergabungnya mereka dalam ISIS karena ISIS sudah muncul di Poso dan mencegah paham ISIS ini agar tidak masif di masyarakat poso (Wawancara dengan AKBP Susnadi Kapolres Poso 5 Agustus 2014).

FKUB di Kabupaten Poso sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Poso. Hal ini dibuktikan dengan adanya APBD untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan membentuk forum-forum seperti forum komunikasi umat beragama (FKUB). Sebagaimana pernyataan Bapak T. Syamsury bahwa "Melalui anggaran APBD Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan forum-forum seperti forum komunikasi umat beragama (FKUB) yang telah berjalan dengan baik dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dalam forum tersebut tergabung tokoh-tokoh agama dari pihak muslim, kristen, budha dan hindu. FKUB ini guna mewedahi jika terjadi benturan-benturan dan perselisihan antar agama (Wawancara dengan T. Syamsury, Wakil Bupati Poso 2010-2015 pada 5 Agustus 2014)".

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Poso membentuk FKUB yang di biayai oleh APBD. Pembentukan FKUB di Kabuapten Poso ini sangat membantu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Poso dan dapat mencegah terjadinya perpecahan lagi antara kedua kelompok-kelompok agama di Poso. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan pembinaan terhadap mantan napi teroris dengan cara membatasi ruang gerak mereka agar paham radikal ini tidak meluas kemasyarakat.

Adanya dialog antar umat beragama ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Poso telah melakukan resolusi konflik dengan cara meminimalisir sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru. Dialog antar umat beragama memiliki dampak positif bagi keragaman agama. Dilihat dari intern umat beragama dapat lebih menguatkan kemampuan menghayati dan mendalami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi ekstrem, umat dapat lebih memahami keberadaan agama lain. Mengingat kekerasan atas nama agama menjadi permasalahan yang begitu pelik di Indonesia, kerukunan antar umat beragama di Negeri ini akan bisa terlaksana dengan baik, bila semua tokoh agama dan umatnya masing-masing mau menahan diri untuk tidak terprovokasi mengenai isu agama yang dapat menyebabkan perselisihan.

#### **KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH POSO DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL**

Strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:  
A. BELUM ADA REKONSILIASI PERMANEN

Bapak Frans Saolino sebagai tokoh masyarakat menyatakan bahwa seharusnya ada rekonsiliasi permanen yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan program kongres masyarakat poso dengan pendekatan kemanusiaan jangan ada lagi

yang merasa terdiskriminasi, ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Poso belum ada rekonsiliasi permanen. Seharusnya Pemerintah Daerah Poso memiliki rumusan rekonsiliasi yang baku dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di Kabuapten Poso. Belum adanya rekonsiliasi permanen ini akan menjadi kendala dalam menghadapi konflik sosial di Poso. Dalam rangka rekonsiliasi ini seharusnya pihak-pihak netral yang mengontrol terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat membuat rumusan yang baku mengenai penyelesaian masalah sosial di Poso.

Sebenarnya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah membuat Perjanjian damai di Malino yang menghasilkan 11 poin kesepakatan damai. Akan tetapi dalam pernjanjian tersebut tidak ada poin yang mengungkapkan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian. Sehingga sampai saat ini teror masih terjadi di Kabupaten Poso.

Rekonsiliasi merupakan perbuatan menyelesaikan perbedaan yang timbul akibat konflik. Strategi dalam menghadapi konflik dapat dilakukan dengan manajemen konflik konstruktif yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Melalui strategi ini memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil akhir. Strategi penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000: 123), dalam pertemuan ini dilakukan identifikasi atas sumber yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan melakukan pengembangan alternatif-alternatif solusi untuk menyelesaikannya.

## PEMERINTAH PUSAT BELUM TEPAT SASARAN

Program dana bantuan recovery dan penanggulangan kemiskinan pasca konflik Poso merupakan program yang diluncurkan kementerian kesejahteraan sosial pada November 2006 untuk membantu perekonomian warga Poso yang terjebak dalam kemiskinan akibat konflik itu dalam pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Dalam perkembangannya dana recovery tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Frans Saolino bahwa “dana recovery untuk tragedi kemanusiaan dari pemerintah pusat belum tepat sasaran, hingga hari ini poso masih di jadikan komoditas untuk dana recovery dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah, komunitas kemanusiaan dan LSM-LSM memanfaatkan dana recovery tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Ada istilah yang berkembang diposo bahwa pasca tragedi kemanusiaan terjadi “elit pemerintah daerah membeli super kijing sedangkan masyarakat membeli super mie”. Seharusnya dana recovery digunakan untuk menghilangkan trauma masyarakat, pembangunan ekonomi di poso bukan hanya digunakan pembangunan fisik yang hancur akibat tragedi kemanusiaan tersebut. Masih belum tepat saasarannya penggunaan dan pengelolaan dana recovery oleh pemerintah daerah (Wawancara dengan Frans Saolino, tokoh masyarakat tanggal 22 Juli 2014).

Tidak tepatnya dana bantuan recovery ini tentunya akan menyebabkan terhambatnya pemulihan konflik di Kabupaten Poso. Pasca tragedi kemanusiaan yang dialami masyarakat Poso sebenarnya mengalami rasa sakit pada non fisik seperti rasa trauma, kehilangan, dendam dan lain sebagainya. Hingga saat ini di Poso masih ada kekhawatiran dengan rasa aman terhadap masyarakat karena secara substansi kebijakan Pemerintah Daerah Poso belum dapat mencegah ancaman terhadap masyarakat Poso. Tolak ukurnya masih adanya teror, masih munculnya persepsi gap-gap antar

**250** kelompok belum adanya rasa persatuan masih terjadi di Poso.

Masih adanya adanya teror, masih munculnya persepsi gap-gap antar kelompok belum adanya rasa persatuan ini tentunya dapat menghambat pencegahan konflik sosial. Untuk mencegah terjadinya teror tersebut, maka diperlukan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik menurut Rangga (2011: 10) mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan nonfisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan hanya bertumpu pada salah satu aspek saja, yaitu pembangunan fisik saja atau pembangunan non fisik saja, tetapi kedua pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesejahteraan bidang kesehatan, maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya. Peran manusia dalam pembangunan nonfisik jangan dipandang sebelah mata, namun peran manusia dalam pembangunan nonfisik perlu diperhatikan (Rangga, 2011:10).

Usaha di bidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio visual), dan dengan cara memberi stimulasi. Ketiga cara tersebut dilakukan agar masyarakat Poso menyadari bahwa mereka hidup di lingkungan dengan beragam suku, agama dan budaya yang harusnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Manusia selalu mengadakan adaptasi terhadap lingkungan dan aktif terhadap lingkungannya. Adaptasi dan aktivitas manusia ini mencerminkan dan juga mengakibatkan adanya perubahan, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan kultural, dan perubahan - perubahan lainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan adaptasi dan untuk menerapkan usaha di bidang pembangunan non fisik, manusia harus melihat situasi dan kondisi pada masing-masing daerah. Hal ini dilakukan karena pembangunan nonfisik

antara daerah satu dan daerah lainnya berbeda-beda. Sehingga timbul permasalahan bagaimana untuk menerapkan pembangunan nonfisik dapat berjalan baik dan merata. Jawabannya adalah tergantung masing-masing individu dalam menerima dan menerapkan tantangan pembangunan nonfisik itu sendiri (Rangga, 2011:11).

Pembangunan nonfisik di Poso dalam mencegah teror dan persepsi gap-gap antar kelompok ini perlu direalisasikan. Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah melakukan pembangunan non fisik seperti pendidikan multikultural dan pembentukan FKUB. Akan tetapi kedua pembangunan non fisik tersebut belum menyebar secara luas pada masyarakat Poso. FKUB dilakukan hanya untuk tokoh-tokohnya saja. Menurut tokoh masyarakat setempat, dialog antar umat beragama yang dilakukan saat ini belum dapat membantu dalam proses pemulihan tragedi kemanusiaan di Poso karena label yang terbangun jika ada pertemuan kelompok agama ini yang memberikan persepsi tragedi kemanusiaan ini merupakan permasalahan agama. Sedangkan pendidikan multikultural baru diperuntukkan untuk para siswa. Untuk itu pembangunan non fisik perlu ditingkatkan lagi, sehingga akan memperkecil terjadinya konflik kembali.

### C. ADANYA ANGGAPAN AGAMA PENYEBAB TIMBULNYA KONFLIK

Dialog antar umat beragama tidak dapat membantu dalam proses pemulihan tragedi kemanusiaan di Poso. Hal ini dikarenakan label yang terbangun jika ada pertemuan kelompok agama ini memberikan persepsi tragedi kemanusiaan ini merupakan permasalahan agama. Padahal konflik sosial di Poso merupakan karena adanya ketidakadilan dan masalah ekonomi (Wawancara dengan Frans Saolino, tokoh masyarakat tanggal 22 Juli 2014).

Adanya anggapan bahwa Agama penyebab timbulnya konflik sosial di Poso maka konflik akan mudah pecah hanya perseteruan

kecil. Perseturuan kecil, semacam perkelahian antar personal pun bisa menjadi pemicu kerusuhan. Seperti, ada dua pemuda terlibat perkelahian, yang satu beragama Islam dan yang satunya lagi beragama Kristen. Karena salah satu pihak mengalami kekalahan, maka ada perasaan tidak terima diantara keduanya. Setelah itu salah satu, atau bahkan keduanya, melaporkan masalah tersebut ke kelompok masing-masing, dan timbullah kerusuhan yang melibatkan banyak orang dan bahkan kelompok.

Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi menjadi dua kelompok agama besar, Islam dan Kristen. Persentase pemeluk agama di Poso Tahun 2012 berdasarkan data dari BPSS adalah 39.26% Islam dan 55.17% Kristen. Sebelum pemekaran, Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali, Morowali Utara dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adalah agama Kristen.

Konflik dengan dalih keberagaman ini lah yang menjadi salah satu pemantik seringnya terjadi berbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu kerusuhan yang berlatar belakang sosial-budaya, ataupun kerusuhan yang berlatarbelakang agama, seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso tahun 1998 dan kerusuhan tahun 2000. Agama seolah-olah menjadi kendaraan dan alasan tendesius untuk kepentingan masing-masing. Jika masyarakat masih beranggapan bahwa Agama penyebab timbulnya konflik sosial di Poso maka upaya untuk mencegah konflik sosial akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Poso harus berupaya keras untuk menghapus anggapan penyebab konflik sosial di Poso karena agama.

### **KESIMPULAN**

Terdapat tiga strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi konflik social: pertama, kebijakan pembangunan ekonomi. Strategi ini dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah Kabupaten Poso memberikan anggaran khusus dalam bidang Pertanian, UKM dan Koperasi serta Pariwisata sesuai dengan

prioritas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso periode 2010-2015. Namun kebijakan dalam pembangunan ini menurut penulis masih kurang tepat, hal ini dikarenakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso masih bersifat fisik tidak berorientasi pada non fisik. Dengan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Poso ini masyarakat sebenarnya mengalami rasa sakit pada non fisik karena rasa trauma dan dendam. Hal ini dibuktikan masih adanya teror, masih munculnya persepsi gap-gap antar kelompok belum adanya rasa persatuan. Oleh karena itu, pembangunan dengan orientasi non fisik sebenarnya juga sangat penting untuk dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Strategi kedua yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi konflik sosial adalah pendidikan multikultural dengan membangun sekolah harmoni yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Poso, tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan. Pendidikan multikultural ini menurut penulis lebih tepat lagi jika semua kalangan mendapatkan pendidikan multikultural ini bukan hanya pada anak usia sekolah.

Strategi ketiga yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi konflik sosial adalah dialog antar umat beragama. Strategi ini dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang didanai APBD. Dialog antar umat beragama ini memang berdampak positif akan tetapi dialog antar umat beragama ini perlu lebih diperjelas lagi pembahasannya. Dialog antar umat beragama jangan hanya dilakukan jika ada masalah akan tetapi sudah dirumuskan dengan jelas kapan, dimana dan apa yang akan dibahas dalam setiap pertemuan.

Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi konflik sosial adalah pertama belum ada rekonsiliasi permanen. Kedua, dana recovery untuk tragedi kemanusiaan dari Pemerintah Pusat belum tepat sasaran. Ketiga, adanya anggapan bahwa agama penyebab timbulnya konflik.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka rekomendasi yang peneliti tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso hendaknya membentuk tim yang khusus melakukan pembangun non fisik.
2. Pengawasan danarecovery diperketat karena rawan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Pemerintah Daerah Poso harus berupaya menghapus bahwa agama merupakan penyebab timbulnya konflik sosial di Poso.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso hendaknya membentuk tim untuk merumuskan rekonsiliasi permanen antar pihak yang berkonflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bunyamin, Maftuh. 2005. *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Bandung: Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia
- Gito sudarmo dan Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Edisi Pertama. Jogjakarta: Erlangga
- Hendrajaya, Liliek dkk. 2010. *Ragam konflik di indonesia: corak dasar dan Resolusinya*. Jakarta: BPPKP.
- Hidayat, Komaruddin. 1995. *Agama Masa Depan: Perspektif Perenial*. Jakarta: Paramadina.
- Klinken, Gerry Van. 2007. *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KTLV.
- Marrus, Stephanie K. 2002. *Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. Wiley. USA.
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muradi. 2012. *Densus 88 AT Konflik, Teror, dan Politik*Cetakan I. Bandung: Dian Cipta
- Pamuji M. Nanang dkk. 2008. *Success Story Mekanisme Komunitas dalam Penanganan dan Pencegahan Konflik: di Kasus di Desa Wayame (Ambon) dan Desa Tangkura (Poso)*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Poloma, Mrgret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Penerjemah Yasogama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Scannell, Mary. 2010. *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke 7. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutarno. 2007. *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Depdikna.
- Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tjandra, Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2002. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.

#### JURNAL/ARTIKEL

- Maharani, Ega Asnatasia 2008. "Hubungan Adult Attachment dengan Manajemen Konflik dalam Pernikahan". Publikasi Ilmiah Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Muin, H. A. 2008. "Sumber-sumber Konflik di Poso dan Penanganannya Dalam Konflik Komunal: Studi Kasus Poso 1998-2007". *Tesis* Magister pada Program Magister Studi Pembangunan Alur Studi Pertahanan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- Nanny. 2013. "Konflik Poso dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Informatika Multimedia (JIM) Stimed Nusa Palapa*. Vol. 2 No. 1 April 2013.
- Nasrudin, Imam. 2012. "Menggagas Pendidikan Multikultural (Opsi Legal Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal)". Artikel. Di unduh dari <http://sumsel.kemenag.go.id/>, 07 September 2014.
- Noer, Mohammad dan Firdaus Syam. 2008. "Peran Serta Masyarakat dan Negara dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia", *Jurnal Poelitik* Volume 4, No. 2/2008
- Priyantini, A. 2008. "Hubungan Antara Gaya Manajemen Konflik dengan Kecendrungan Prilaku Agresif Narapidana Usia Remaja di Lapas Anak Pria Tangerang". *Jurnal Psiko-Edukasi* Vol.6. Mei 2008.
- Rangga, Bhian. 2011. "Pembangunan Fisik dan Pembangunan Non Fisik". *Makalah*. Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Robert Alexander. 2005. "Konflik Antar Etnis dan Penangulangannya (Suatu Tinjauan Kriminolog dalam Kasus Kerusakan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah)". *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Rudolf Volman. 2014. "Strategi Kamboja dalam Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear Pasca Bentrokan Bersenjata dengan Militer Thailand Tahun 2011". *E-Journal Ilmu*

- Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 37-48
- Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat. 2013. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konflik Sosial". Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol 16 No 1 Juli 2013.
- Syaifuddin Iskandar Ardiansyah. 2010. "Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik". Journal Unair Tahun 2010, Volume 23, Nomor 4.
- Tan, Sofyan. 2006. "Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman Konflik sosial Bangsa". Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi. Vol II. No 1.
- Widodo, Mardi. 2012. "Pendidikan Multikultural Sebagai Wahana Dalam Mengatasi Disintegrasi Sosial Bangsa Indonesia". Jurnal Ilmiah Unirow Tuban Vol 10 No 2 (2012).
- Witarti, Denik I dkk. 2012. "Kajian Perbandingan Dinamika Konflik Etnis-Politik Non-Internasional Diasia Tenggara Studi Kasus: Indonesia, Malaysia dan Thailand". Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.7 No.1 Juni 2012.

#### WEBSITE

- Asmoko, Hindri. 2011. Manajemen Strategis Pada Pemerintah Daerah: Inovasi Menuju Birokrasi Profesional. Terdapat pada [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)
- Gumilang, Martin Arianto. 2014. "Pengendalian Jumlah Penduduk dan Pencegahan Konflik Sosial". Diakses dari <http://setkab.go.id/artikel-12923-pengendalian-jumlah-penduduk-dan-pencegahan-konflik-sosial.html> jam 13.00 7 September 2014.
- Miyarso, Estu. 2007. Manajemen Konflik Mahasiswa Sebagai Metode Pembelajaran Alternatif. Diakses dari [staff.uny.ac.id](http://staff.uny.ac.id)
- Mangun, Rusnah. 2011. "Koperasi Poso Tumbuh Signifikan". Diakses dari <http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=14428&kid=all>

#### DOKUMEN

- Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2035.